

Nama : Khoirun Nisa

NPM : 2313031005

Matkul: ASP_PERTEMUAN 7

SOAL PILIHAN GANDA

1. Sektor publik dituntut untuk melaksanakan prinsip Value for Money (VfM) dalam pengelolaan sumber daya. Namun, beberapa instansi masih fokus pada serapan anggaran (budget absorption) tanpa menilai hasilnya. Berdasarkan konsep VfM, kelemahan utama dalam praktik tersebut adalah....

- a. Tidak memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya
- b. Terlalu berorientasi pada outcome daripada output
- c. Menekankan efektivitas daripada pemerataan hasil
- d. Mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan sosial
- e. Fokus pada efisiensi fiskal tanpa memperhatikan akuntabilitas

2. Dalam praktik akuntansi sektor publik, akuntabilitas publik memiliki empat dimensi utama. Jika sebuah pemerintah daerah sudah mematuhi hukum dan prosedur, namun gagal mencapai target pelayanan masyarakat, maka bentuk akuntabilitas yang belum terpenuhi adalah....

- a. Akuntabilitas kejujuran
- b. Akuntabilitas hukum
- c. Akuntabilitas proses
- d. Akuntabilitas program
- e. Akuntabilitas kebijakan

3. Prinsip good governance menurut UNDP menekankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Jika sebuah instansi pemerintah melaksanakan program publik tanpa

melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, maka prinsip *good governance* yang paling dilanggar adalah....

- a. Accountability
- b. Equity
- c. Participation
- d. Efficiency
- e. Rule of Law

4. Salah satu karakteristik organisasi sektor publik adalah adanya pengaruh politik yang kuat dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini dapat menimbulkan rent seeking behavior yang menghambat efisiensi dan akuntabilitas. Upaya paling tepat untuk mengurangi fenomena tersebut adalah....

- a. Memperluas intervensi politik agar pengawasan meningkat
- b. Meningkatkan privatisasi agar fungsi pemerintah berkurang
- c. Memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi public
- d. Menyerahkan pengambilan keputusan kepada investor swasta
- e. Meningkatkan sentralisasi agar keputusan lebih cepat diambil

5. Desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan partisipasi dan alokasi sumber daya yang lebih efisien. Namun, di beberapa daerah justru muncul ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan konsep otonomi daerah, fenomena ini disebabkan oleh....

- a. Pemerintah pusat mengurangi peran legislatif daerah
- b. Perbedaan kapasitas fiskal dan kelembagaan antar daerah
- c. Kurangnya transparansi dalam pelaporan anggaran nasional
- d. Terlalu tingginya keterlibatan masyarakat dalam keputusan public
- e. Tidak adanya koordinasi vertikal antara BUMN dan BUMD

6. Dalam organisasi sektor publik, akuntansi manajemen berfungsi menyediakan informasi bagi manajemen untuk mengambil keputusan strategis. Jika suatu instansi pemerintah

hanya menggunakan laporan keuangan historis tanpa memperhatikan data prospektif, maka konsekuensi yang paling mungkin terjadi adalah....

- a. Efisiensi meningkat karena keputusan diambil lebih cepat
- b. Keputusan strategis menjadi tidak adaptif terhadap perubahan masa depan
- c. Pengendalian keuangan menjadi lebih akurat karena berbasis data lama
- d. Sistem akuntansi menjadi lebih sederhana dan transparan
- e. Stakeholder dapat menilai kinerja organisasi secara menyeluruh

7. Salah satu misi akuntansi manajemen menurut Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) adalah memberikan informasi untuk perlindungan aset. Jika lembaga publik gagal mencegah kebocoran dana hibah karena lemahnya sistem pelaporan, maka kelemahan utama terletak pada....

- a. Perencanaan strategik yang tidak realistis
- b. Sistem pengendalian organisasi yang tidak efektif
- c. Penganggaran yang tidak efisien
- d. Penentuan tarif layanan yang tidak sesuai
- e. Informasi kualitatif yang berlebihan

8. Dalam organisasi bisnis, pengendalian manajemen sering dilakukan melalui mekanisme negosiasi (negotiated bargain), sedangkan pada sektor publik lebih bergantung pada peraturan birokrasi. Perbedaan utama ini menyebabkan....

- a. Sektor publik lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan pengeluaran
- b. Sektor bisnis lebih lambat karena membutuhkan kesepakatan semua pihak
- c. Sektor publik lebih sulit beradaptasi karena terikat pada prosedur formal
- d. Sektor publik lebih efisien karena ada kepastian hukum
- e. Sektor bisnis kurang transparan dalam penggunaan sumber daya

9. Menurut Jones dan Pendlebury (1996), proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik terdiri dari lima tahap. Jika tahap pelaporan dan umpan balik diabaikan, maka dampak paling signifikan bagi organisasi publik adalah....

- a. Tujuan strategis tetap tercapai karena pelaporan bukan prioritas utama
- b. Evaluasi kinerja menjadi tidak objektif dan pengambilan keputusan masa depan terganggu
- c. Efisiensi meningkat karena proses administrasi berkurang
- d. Komunikasi antarbagian menjadi lebih lancar
- e. Sistem pengendalian keuangan tetap dapat berjalan secara otomatis

10. Sebuah instansi menggunakan informasi kuantitatif dalam pengambilan keputusan anggaran tanpa memperhatikan data kualitatif seperti kepuasan masyarakat. Berdasarkan prinsip akuntansi manajemen sektor publik, keputusan tersebut berisiko karena....

- a. Informasi kuantitatif tidak dapat diandalkan dalam organisasi public
- b. Data kualitatif justru lebih penting daripada data kuantitatif
- c. Informasi yang digunakan tidak lengkap untuk menilai efektivitas layanan
- d. Penggunaan data formal akan menurunkan akuntabilitas public
- e. Data kualitatif sulit diukur sehingga tidak relevan untuk pengendalian

11. Dalam organisasi sektor publik, sistem pengendalian manajemen dibutuhkan agar strategi yang telah dirancang dapat berjalan efektif dan efisien. Jika suatu instansi pemerintah memiliki rencana strategis yang baik tetapi gagal mencapai hasilnya, maka kelemahan utama yang paling mungkin terjadi adalah....

- A. Perencanaan strategis yang kurang terukur
- B. Kurangnya mekanisme pengendalian manajemen yang memastikan implementasi strategi
- C. Evaluasi kinerja dilakukan secara berlebihan
- D. Komunikasi hanya dilakukan pada level atas
- E. Koordinasi tidak diperlukan karena sudah ada SOP

12. Sebuah dinas pemerintah membuat kebijakan baru yang mewajibkan verifikasi dua tingkat sebelum pengeluaran dana dilakukan. Kebijakan ini termasuk dalam jenis pengendalian manajemen....

- a. Pengendalian operasional
- b. Pengendalian preventif**
- c. Pengendalian kinerja
- d. Pengendalian administrative
- e. Pengendalian hasil

13. Seorang kepala dinas meminta laporan kinerja triwulanan untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran. Berdasarkan sistem pengendalian manajemen, tindakan ini termasuk jenis....

- a. Pengendalian preventif, karena mencegah penyimpangan di awal
- b. Pengendalian operasional, karena memastikan prosedur dijalankan
- c. Pengendalian kinerja, karena menilai hasil pelaksanaan dan efisiensi kerja**
- d. Pengendalian administratif, karena terkait laporan tertulis
- e. Pengendalian keuangan, karena berkaitan dengan laporan anggaran

14. Jika sebuah organisasi publik memiliki koordinasi dan komunikasi internal yang kuat, tetapi tidak memiliki sistem evaluasi dan umpan balik yang baik, maka dampak jangka panjang yang paling mungkin terjadi adalah....

- a. Peningkatan efisiensi karena proses berjalan cepat
- b. Kinerja meningkat meski tanpa evaluasi
- c. Tidak ada pembelajaran organisasi sehingga kesalahan berulang**
- d. Koordinasi menggantikan fungsi control
- e. Motivasi pegawai meningkat karena kurangnya pengawasan

15. Pemerintah menerapkan sistem pengendalian berbasis hasil (result-based control) untuk memastikan program sosial tepat sasaran. Namun, pegawai justru berfokus pada pencapaian indikator kuantitatif tanpa memperhatikan kualitas layanan. Berdasarkan teori sistem pengendalian manajemen, kondisi ini disebut....

- a. Goal displacement**
- b. Under control

- c. Over control
- d. Miscommunication
- e. Cost rigidity

16. Sebuah pemerintah daerah mengalami defisit karena belanja publik meningkat tajam tanpa adanya peningkatan pendapatan. Untuk menstabilkan perekonomian, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal melalui instrumen anggaran. Dalam konteks ini, fungsi anggaran yang paling tepat digunakan adalah....

- a. Anggaran sebagai alat motivasi
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal
- d. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
- e. Anggaran sebagai alat politik

17. Dalam proses penyusunan APBD, ditemukan bahwa target pendapatan daerah tidak realistis dan menyebabkan banyak program tidak berjalan. Berdasarkan prinsip penganggaran sektor publik, kelemahan ini terjadi karena....

- a. Pemerintah tidak melakukan koordinasi antar bagian dalam proses anggaran
- b. Tidak ada keterlibatan masyarakat dalam siklus anggaran
- c. Tujuan anggaran hanya berorientasi pada efisiensi jangka pendek
- d. Anggaran tidak didasarkan pada taksiran pendapatan yang realistis pada tahap persiapan
- e. DPRD tidak melakukan pengawasan yang efektif

18. Legislatif menolak rancangan APBD karena eksekutif tidak dapat menjelaskan prioritas alokasi belanja publik. Berdasarkan konsep **fungsi politik anggaran**, hal ini menunjukkan bahwa....

- a. Pemerintah gagal membangun kepercayaan masyarakat karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas

- b. DPRD telah melanggar prinsip koordinasi anggaran dengan menolak rancangan tersebut
- c. Fungsi kebijakan fiskal telah dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif
- d. Mekanisme pelaporan dan evaluasi telah selesai dilakukan
- e. Pemerintah telah mencapai efisiensi maksimal dalam perencanaan anggaran

19. Jika dalam tahap pelaksanaan anggaran terjadi overspending (pengeluaran melebihi anggaran), langkah pengendalian yang paling tepat berdasarkan prinsip control tool adalah....

- a. Menambah alokasi dana tanpa meninjau penyebabnya
- b. Menunda pelaporan agar tidak menimbulkan konflik politik
- c. Melakukan analisis selisih anggaran untuk mengidentifikasi penyebab yang dapat dikendalikan
- d. Mengalihkan dana dari program lain tanpa persetujuan DPRD
- e. Melakukan revisi anggaran tanpa audit internal

20. Pada tahap pelaporan dan evaluasi, pemerintah membuka forum diskusi publik dengan masyarakat, akademisi, dan LSM untuk menilai efektivitas APBD. Langkah ini menggambarkan fungsi anggaran sebagai....

- a. Alat kebijakan fiskal
- b. Alat penilaian kinerja
- c. Alat koordinasi dan komunikasi
- d. Alat untuk menciptakan ruang publik
- e. Alat perencanaan pembangunan

21. Pemerintah daerah masih menggunakan sistem anggaran tradisional yang berorientasi pada input. Setiap tahun, penganggaran hanya dilakukan dengan menambah sedikit dari tahun sebelumnya tanpa meninjau ulang efektivitas program. Dalam jangka panjang, kondisi ini paling mungkin menyebabkan....

- a. Meningkatnya efisiensi karena alokasi sudah stabil dari tahun ke tahun

- b. Transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih tinggi
- c. Inefisiensi anggaran dan kegagalan mengaitkan belanja dengan kinerja
- d. Penguatan hubungan antara rencana jangka panjang dan anggaran tahunan
- e. Proses anggaran lebih cepat dan mudah tanpa evaluasi mendalam

22. Dalam semangat New Public Management (NPM), pemerintah mulai menerapkan tender terbuka untuk proyek-proyek pembangunan daerah dan menilai hasil berdasarkan output. Tujuan utama pendekatan ini adalah....

- a. Memastikan pengawasan politik terhadap setiap proses penganggaran
- b. Menjaga kesinambungan sistem birokrasi yang kaku
- c. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil dalam pelayanan public
- d. Menjamin pemerataan sumber daya antar sektor pemerintahan
- e. Mengembalikan fungsi pemerintah sebagai pengendali penuh kegiatan ekonomi

23. Suatu instansi pemerintah menggunakan Zero Based Budgeting (ZBB) untuk menyusun anggaran tahun berikutnya. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa beberapa kegiatan lama tidak lagi memberikan manfaat signifikan. Berdasarkan prinsip ZBB, tindakan yang paling tepat adalah....

- a. Melanjutkan kegiatan lama agar kesinambungan tetap terjaga
- b. Menghapus kegiatan lama dan mengalokasikan anggaran ke program yang lebih relevan
- c. Mengurangi jumlah dana kegiatan lama tanpa melakukan analisis lanjutan
- d. Menambah kegiatan lama agar terlihat produktif
- e. Menunda semua kegiatan hingga ada keputusan dari pusat

24. Dalam sistem Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS), ditemukan bahwa beberapa program antardepartemen tumpang tindih dan tidak efisien. Berdasarkan karakteristik PPBS, langkah perbaikan yang paling sesuai adalah....

- a. Mempertahankan semua program karena sudah berjalan lama
- b. Menambah jumlah program untuk memperluas partisipasi public

- c. Melakukan evaluasi lintas departemen untuk menghapus program yang overlapping
- d. Menyerahkan program yang tidak efisien kepada sektor swasta
- e. Menghentikan seluruh program untuk menghemat anggaran

25. Meskipun PPBS dan ZBB dinilai unggul dalam teori, banyak negara berkembang gagal menerapkannya secara efektif. Faktor utama penyebab kegagalan tersebut adalah....

- a. Terlalu banyak fleksibilitas dalam proses anggaran
- b. Tidak adanya dukungan politik dan data yang memadai untuk analisis rasional
- c. Pengawasan terlalu ketat dari lembaga legislative
- d. Adanya tekanan untuk segera menyeimbangkan anggaran
- e. Sistem ini tidak memerlukan staf ahli yang kompeten

26. Pemerintah daerah berencana membangun rumah sakit baru, namun data menunjukkan bahwa rumah sakit lama masih beroperasi dengan tingkat hunian 60%. Berdasarkan prinsip analisis kebutuhan investasi publik, keputusan yang paling rasional adalah....

- a. Melanjutkan pembangunan karena investasi baru mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
- b. Menunda proyek dan melakukan investasi penggantian untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit lama
- c. Mengalihkan dana ke proyek lain yang memiliki manfaat sosial lebih besar
- d. Melanjutkan proyek tetapi dengan mengurangi kualitas fasilitas
- e. Meningkatkan tarif layanan rumah sakit lama untuk menutup biaya operasional

27. Suatu proyek publik memiliki aliran kas positif yang besar di masa depan, tetapi nilai Net Present Value (NPV) negatif. Hal ini menunjukkan bahwa....

- a. Proyek tersebut tetap layak karena manfaat sosial sulit diukur secara moneter
- b. Proyek tidak layak karena nilai sekarang dari manfaat lebih kecil dari biayanya
- c. Proyek dapat diterima jika memiliki efek eksternalitas positif
- d. Tingkat diskonto yang digunakan terlalu kecil untuk mencerminkan risiko
- e. NPV tidak relevan dalam penilaian proyek sosial

28. Dalam konteks investasi publik, tingkat diskonto yang tinggi biasanya mencerminkan....

- a. Harapan akan inflasi rendah di masa depan
- b. Resiko proyek yang rendah dan stabilitas politik tinggi
- c. Resiko investasi dan inflasi yang tinggi, sehingga investor menuntut imbal hasil lebih besar
- d. Kebijakan fiskal ekspansif pemerintah pusat
- e. Tingkat pengembalian sosial yang konstan dari waktu ke waktu

29. Sebuah proyek jembatan menghasilkan rasio manfaat-biaya (M/C) = 0,8. Namun proyek tetap dijalankan karena diyakini memiliki nilai sosial tinggi (akses pendidikan, kesehatan, konektivitas desa). Berdasarkan konsep net social benefit, keputusan ini dapat dibenarkan jika....

- a. Proyek memiliki nilai NPV negatif tetapi berdampak komersial
- b. Proyek menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan
- c. Manfaat sosial eksternal lebih besar dari manfaat privat yang terukur
- d. Biaya sosial lebih rendah dari biaya privat yang diukur
- e. Nilai manfaat dan biaya tidak dapat dihitung secara kuantitatif

30. Dalam analisis efektivitas biaya (Cost-Effectiveness Analysis), dua proyek pendidikan menghasilkan hasil belajar yang sama, tetapi biaya proyek A lebih rendah dibandingkan proyek B. Berdasarkan prinsip efektivitas biaya, maka....

- a. Proyek B lebih baik karena memiliki manfaat sosial yang lebih sulit diukur
- b. Proyek A dipilih karena menghasilkan output yang sama dengan biaya lebih efisien
- c. Kedua proyek tidak layak karena manfaatnya tidak dapat dikuantifikasi
- d. Proyek B tetap dipilih karena memiliki jangka waktu lebih Panjang
- e. Tidak ada perbedaan karena manfaat sosial tidak dinilai dengan uang

31. Pemerintah daerah menerapkan tarif tinggi untuk layanan air bersih di musim kemarau dengan alasan biaya operasional meningkat. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan protes karena masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan membayar.

Berdasarkan konsep marginal cost pricing **dan** pertimbangan ekuitas, tindakan pemerintah seharusnya adalah....

- a. Menurunkan tarif bagi semua konsumen agar tidak menimbulkan ketidakadilan
- b. Menaikkan tarif tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar masyarakat
- c. Menetapkan tarif berbeda berdasarkan kelompok sosial dan jumlah konsumsi
- d. Menghapus semua tarif karena air merupakan barang publik sepenuhnya
- e. Menyerahkan penyediaan air kepada sektor swasta untuk efisiensi

32. Sebuah layanan jalan tol dikelola oleh BUMN dengan tarif yang ditetapkan di atas marginal cost untuk mencapai full cost recovery. Namun, volume kendaraan menurun drastis. Kondisi ini menunjukkan bahwa....

- a. Penetapan harga telah mencapai efisiensi ekonomi
- b. Full cost recovery tidak sesuai diterapkan pada barang public
- c. Kebijakan harga telah mempertimbangkan eksternalitas konsumsi
- d. Pemerintah sebaiknya meningkatkan pajak untuk subsidi tol
- e. Harga marginal cost lebih tepat diterapkan pada kondisi penurunan permintaan

33. Dalam praktik charging for service, pemerintah lebih memilih membebankan biaya langsung dibandingkan menaikkan pajak. Langkah ini terutama didorong oleh....

- a. Keinginan meningkatkan keuntungan pemerintah
- b. Kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan terhadap swasta
- c. Pertimbangan efisiensi ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat
- d. Upaya untuk menurunkan tingkat inflasi dan defisit anggaran
- e. Tuntutan politik agar pemerintah lebih populer di masyarakat

34. Dalam menentukan harga pelayanan publik, pemerintah dihadapkan pada dilema antara prinsip efisiensi dan pemerataan. Jika pemerintah menetapkan tarif rendah untuk alasan sosial, konsekuensi yang paling mungkin terjadi adalah....

- a. Permintaan menurun karena masyarakat tidak membutuhkan lagi layanan tersebut

- b. Efisiensi ekonomi tercapai karena biaya operasional menurun
- c. Terjadi kelebihan permintaan dan potensi inefisiensi sumber daya
- d. Terjadi peningkatan keuntungan karena tarif lebih terjangkau
- e. Masyarakat kaya berhenti menggunakan layanan public

35. Dalam konteks pelayanan publik sektor energi, jika pemerintah ingin menerapkan peak-load pricing, maka strategi harga yang tepat adalah....

- a. Menetapkan harga tetap untuk semua waktu penggunaan
- b. Memberikan subsidi besar saat permintaan tinggi
- c. Menetapkan tarif lebih tinggi pada jam sibuk untuk mengurangi beban sistem
- d. Menetapkan tarif lebih rendah pada saat beban puncak
- e. Menghapus perbedaan tarif karena dianggap diskriminatif